

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA SATUAN ORGANISASI DI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian Pejabat di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dipandang perlu menetapkan kembali Pejabat Pembuat Komitmen pada masing-masing Satuan Organisasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Organisasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA SATUAN ORGANISASI DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
- KESATU : Menetapkan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan LKPP.
- KEDUA : PPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) rancangan Kontrak.
 - b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;
 - d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
 - i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - j. selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud diatas, dalam hal diperlukan, Pejabat Pembuat Komitmen dapat:
 - 1) mengusulkan kepada PA/KPA:
 - a) perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - b) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
 - 2) menetapkan tim pendukung;
 - 3) menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
 - 4) menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.
 - k. selain tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf j, PPK Pembangunan Data Center dan Perangkat Jaringan memiliki tugas dan kewenangan membangun membangun *Data Center* (pusat data) dan perangkat jaringan.
- KETIGA : Ruang Lingkup pembagian kegiatan masing-masing PPK pada setiap Satuan Organisasi Eselon II (Biro/Direktorat) di lingkungan LKPP sebagaimana terlampir pada Lampiran Keputusan ini, ditetapkan oleh masing-masing Pejabat Eselon II (Kepala Biro atau Direktur).

- KEEMPAT : PPK yang lama tetap bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan sebelum dikeluarkannya Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Unit Organisasi Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2015

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN
PENYELESAIAN SENGKETA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN,



IKAK GAYUH PATRIASTOMO

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
5. Pejabat Eselon II Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM
DAN PENYELESAIAN SANGGAH
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN PADA SATUAN ORGANISASI
DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 3 TAHUN 2015
TANGGAL : 2 Februari 2015

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA SATUAN ORGANISASI DI LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Nama/NIP/Jabatan Struktural	Jabatan Penugasan
1.	Iwan Herniwan, S.Si, MP. NIP. 19691106 199803 1 006 Kepala Bagian Program dan Anggaran	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
2.	Tjipto Prasetyo Nugroho, Ak. NIP. 19670517 198803 1 001 Kepala Bagian Pemantaun dan Evaluasi	
3.	Jhon Piter Halomoan Situmorang, Ak., M.Ak NIP. 19670101 198703 1 001 Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana	
4.	Moch. Zaini, SAP NIP. 196005201985021001 Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Biro Umum dan Keuangan
5.	Ir. Reflus, M.Si NIP. 19580613 199403 1 001 Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.	

No	Nama/NIP/Jabatan Struktural	Jabatan Penugasan
6.	Raden Ari Widiyanto, S.H., M.E. NIP. 19690813 199703 1 001 Kepala Bagian Hukum dan Humas	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian
7.	Selamet Budiharto, Ak. NIP. 19680223 198903 1 001 Kepala Bagian Sistem Informasi	
8.	Ir.M.Aris Supriyanto, M.T. NIP. 19701110 199603 1 003 Kepala Subdit Barang dan Jasa	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
9.	Gusti Agung Aju Diah Ambarawaty, Ak, M.M NIP. 19670410 198703 2 001 Kepala Subdit Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus
10.	Erwin Sondang S, S.STP, M.Si NIP. 19800614 199810 1 001 Kepala Subdit Badan Usaha dan Keadaan Khusus	
11.	Ir. Zulhenny, M.Dev Plg NIP. 19680309 199402 2 001 Kepala Subdit Iklim Usaha	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada di Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
12.	M. Iskandarsyah, S.Pi., M.Si. NIP. 19721227 200003 1 007 Kepala Subdit Perencanaan Pengadaan APBN	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan
13.	Setyanto Putro, S.E. NIP. 19690118 199503 1 003 Kepala Subdit Monitoring dan Evaluasi	
14.	Ir. Hardi Afriansyah, M.Si. NIP. 19690421 200212 1 001 Kepala Subdit Riset dan Kontrak	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
15.	Drs. Dwi Satrianto NIP. 19651108 1997031 001 Kepala Subdit Pengelolaan Katalog	
16.	Patria Susantosa, S.Si, M.Si NIP. 19731201 200312 1 004 Kepala Subdit Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik

No	Nama/NIP/Jabatan Struktural	Jabatan Penugasan
17.	Ria Agustina Nasution S.E., M.E NIP. 19680829 199503 2 001 Kepala Subdit Standar Kompetensi dan Kelembagaan	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Direktorat Pengembangan Profesi
18.	Ichwan Makmur Nasution, M.Sc NIP. 19750625 200212 1 002 Kepala Subdit Program Pelatihan	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Direktorat Pelatihan Kompetensi
19.	Suharti, S.Psi., M.Si NIP. 19730627 199803 2 002 Kepala Subdit Sistem dan Sarana Sertifikasi	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Direktorat Sertifikasi Profesi
20.	Ir. Ida Poespita, M.Si. NIP. 19620810 199003 2 001 Kepala Subdit Tata Kelola dan Evaluasi Sertifikasi	
21.	Mudjisantosa, S.E., M.M NIP. 19680616 198901 1 001 Kepala Subdit Wilayah I Barat	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I
22.	Yulianto Prihandoyo, S.T., M.T. NIP. 19710731 199803 1 005 Kepala Subdit Wilayah I Timur	
23.	Ir. Irawaty Imran, M.T. NIP. 19600518 199603 2 001 Kepala Subdit Wilayah II Timur	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II
24.	Eko Rinaldo Octavianus, S.E., M.E. NIP. 19691014 199603 1 001 Kepala Subdit Keterangan Ahli	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
25.	Fanni Sufiandi, ST., MT NIP. 19750919 200502 1 003 Kepala Subdirektorat Pekerjaan Konstruksi	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung dan Kantor LKPP
26.	Selamet Budiharto, Ak. NIP. 19680223 198903 1 001 Kepala Bagian Sistem Informasi	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas dalam Pembangunan Data Center dan Perangkat Jaringan

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN
PENYELESAIAN SANGGAH
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN,



IKAK GAYUH PATRIASTOMO